



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

www.id.pn-sangatta.go.id
pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com
(0549) 21324

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, S.H No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit
Pelangi Sangatta – Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 21 Juli 2023
Sekretaris,

Arini Widiastuti, S.IP.
NIP. 197409182006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran - lampiran	36



PENGADILAN NEGERI SANGATTA Kelas II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projojodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp.
0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511
pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 21 Juli 2023

Sekretaris,

Arini Widiastuti, S.IP.
NIP. 197409182006042001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Periode Semester I Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp3.295.200** atau mencapai **48.00 persen** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp6.797.000**.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp2.149.638.362** atau mencapai **51 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp4.219.245.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp8.210.698.358** yang terdiri dari : **Aset Lancar sebesar Rp. 41.214.200** **Aset Tetap (neto) sebesar Rp8,169,484,158** dan **Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp258.410.949** dan **Rp7.952.287.409**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp3.844.400**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp2.358.607.193** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.

2.354.762.793) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp2.354.762.793).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp8,143,338,290 dikurangi Defisit-LO sebesar (2.354.762.793) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.354.762.793 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp7.952.287.409.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	6,797,000.	3,295,200.	(3,501,800.)	48	5,286,000.	3,295,497.	1,990,503.	62
	PENERIMAAN HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	6,797,000.	3,295,200.	(3,501,800.)	48	5,286,000.	3,295,497.	1,990,503.	62
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,990,535,000.	1,605,561,194.	1,384,973,806.	54	3,061,157,000.	1,406,941,013.	1,654,215,987.	46
	BELANJA BARANG	1,228,710,000.	544,077,168.	684,632,832.	44	1,287,799,000.	672,896,172.	614,902,828.	52
	BELANJA MODAL	0.	0.	0.	0	10,000,000.	9,900,000.	100,000.	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA SUBSIDI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

	BELANJA LAIN-LAIN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA JUNA	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Data Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Juna	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,219,245,000.	2,149,638,362.	2,069,606,638.	51	4,358,956,000.	2,089,737,185.	2,269,218,815.	48
C	PEMBIAYAAN				0				0

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NERACA

PER 30 JUNI 2023

(dalam Rupiah)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SATUAN KERJA : 662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
				2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5		
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	40,000,000.	0	40,000,000	0.00		
Piutang Bukan Pajak	549,200.	0	549,200	0.00		
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	549,200.	0	549,200	0.00		
Persediaan	0.	100,000	565,000	565.00		

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

JUMLAH ASET LANCAR	40,549,200.	100,000	41,114,200	41,114.20
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000.	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,928,389,419.	2,908,539,419	19,850,000	0.68
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500.	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047.	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,095,529,818.)	(2,936,982,558)	(2,481,250)	0.08
JUMLAH ASET TETAP	8.013.418.148.	8,152,115,408	17,368,750	0.21
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,900,000.	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000.	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000.)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0.	0	0	NaN
JUMLAH ASET	8,053,967,348.	8,152,215,408	58,482,950	0.72
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	218,310,949.	8,877,118	209,433,831	2,359.25
Utang Yang Belum Ditagihkan	100,000.	0	100,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	40,000,000.	0	40,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	258,410,949.	8,877,118	249,533,831	2,810.98
JUMLAH KEWAJIBAN	258,410,949.	8,877,118	249,533,831	2,810.98
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,795,556,399.	8,143,338,290	(191,050,881)	(2.35)
JUMLAH EKUITAS	7,795,556,399.	8,143,338,290	(191,050,881)	(2.35)
JUMLAH EKUITAS	7,795,556,399.	8,143,338,290	(191,050,881)	(2.35)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,053,967,348	8,152,215,408	58,482,950	0.72

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
 NEGARA/LEMBAGA
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,844,400.	3,844,400.	0.	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,844,400.	3,844,400.	0.	0
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0
Jumlah Pendapatan	3,844,400.	3,844,400.	0.	0
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0
Beban Pegawai	1,791,165,082.	1,764,614,222.	26,550,860.	1.505
Beban Persediaan	12,308,000.	23,718,500.	(12,075,500.)	(50.912)
Beban Barang dan Jasa	319,051,850.	347,763,643.	(28,711,793.)	(8.256)
Beban Pemeliharaan	200,941,123.	286,969,154.	(86,028,031.)	(29.978)
Beban Perjalanan Dinas	35,806,138.	26,888,580.	8,917,558.	33.165
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0
Beban Bunga	0.	0.	0.	0
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0
Beban Hibah	0.	0.	0.	0
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.	116,663,252.	(116,663,252.)	(100.)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0
Beban Transfer	0.	0.	0.	0
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0
JUMLAH BEBAN	2,515,338,203.	2,566,617,351.	(208,010,158.)	(8.104)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,511,493,803)	(2,562,772,951.)	208,010,158.	(8.117)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	297.	(297.)	(100.)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	297.	(297.)	(100.)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	297.	(297.)	(100.)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,511,493,803)	(2,562,772,654.)	208,009,861.	(8.117)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,511,493,803)	(2,562,772,654.)	208,009,861.	(8.117)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS I

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

(dalam rupiah)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	8,143,338,290.	7,998,431,496.	144,906,794.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,511,493,803)	(2,562,772,654.)	208,009,861.	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,163,711,912.	2,086,441,688.	77,270,224.	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(347,781,891)	(476,330,966.)	285,280,085.	-
EKUITAS AKHIR	7,795,556,399.	7,522,100,530.	430,186,879.	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akJunbilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelsaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan*

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

Keuangan Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah rupiah).

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2022. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil

revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang Tak
Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp6.797.000

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp3.295.200** atau **48 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.797.000** Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa pendapatan sewa rumah negara.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 30 Juni 2023*

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425130)	6.797.000	3.295.200	48
Pendapatan Lain – lain (425911)	-	0	0
Jumlah	6.797.000	3.295.200	48

Realisasi pendapatan 30 Juni 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 30 Juni 2022.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari	0	0	0,00

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pemanfaatan BMN (42304)			
Pendapatan Lain – lain (425911)	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	3.295.200	3.295.497	0,00
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Jumlah	3.295.200	3.295.497	(1)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp4.219.245.000

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.149.638.362 atau 51 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.219.245.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	2.990.535.000	1.605.561.194	54
Belanja Barang	1.228.710.000	544.077.168	44
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	4,219,245,000	2,149,638,362	51
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	4.219.245.000	2.149.638.362	51

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2023 dan 2022*

URAIAN	ANGGARA N	REALISASI 30 Juni 2023	ANGGARAN	REALISASI 30 Jun 2022	NAIK (TURU N) %
Belanja Pegawai	2,990,535,000	1.605.561.194	3.061.157.000	1.406.941.013	8

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Belanja Barang	1.228.710.000	544.077.168	1.287.799.000	672.896.172	(8)
Belanja Modal	0	0	10.000.000	9.900.000	(99)
Jumlah	4.219.245.000	2.149.638.362	4.358.956.000	2.089.737.185	3

Belanja Pegawai
Rp1.605.561.194

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.605.561.194 dan Rp 1.406.941.013

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2023	REALISASI 30 JUN 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	552.522.180	484.419.280	6,32
Belanja Pembulatan	11.469	8.922	12,12
Belanja Tunj. Suami / Istri	29.773.530	32.024,030	(2,81)
Belanja Tunj. Anak	8.835.202	8.857.784	(0,1)
Belanja Tunj. Struktural	9.710.000	12.600.000	(8,09)
Belanja Tunj. Fungsional	731.470.000	614.250.000	14,08
Belanja Tunj. Pph PNS	90.258.013	69.620.337	(10,52)
Belanja Tunj. Beras	28.243.800	27.012.660	2,1
Belanja Uang Makan	81.137.000	87.308.000	(2,61)
Belanja Tunj. Umum	8.800.000	6.040.000	10,67
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	64.800.000	64,800,000	0
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1.605.561.194	1,406,941,013	0,17
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	1.605.561.194	1,406,941,013	7,73

Belanja Barang
Rp544.077.168

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023 dan Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 544.077.168 dan Rp672.896.172

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 30 Juni 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 30 Jun 2023	REALISASI 30 Jun 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	280.588.365	284.832.444	(43,35)
Belanja Barang Persediaan	12.208.000	23.718.500	(35,97)
Belanja Jasa	5.558.542	50.437.494	(10,42)
Belanja Pemeliharaan	200.841.123	287.019.154	(20,87)
Belanja Barang Non Operasional	9.075.000	0	100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35.806.138	26.888.580	13,48
Jumlah Belanja Barang Kotor	544.077.168	672.896.172	0,06
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja Barang	544.077.168	672.896.172	(7,97)

Belanja Modal
Rp.0

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2022 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.900.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Jun 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.900.000	(100)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja Modal	0	9.900.000	(100)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.40.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 653256629861000	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.0

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 100.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Rincian Persediaan :

Persediaan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Barang Konsumsi	0	100.000
Jumlah	0	100.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp3.279.400.000

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.279.400.00 dan Rp3.279.400.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 30 Juni 2023.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	3.279.400.000
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2023	3.279.400.000
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	3.279.400.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.245 m2	Jl. Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No. 01 Sangatta	2.773.500.000
2	700 m2	Jl. Soekarno Hatta Komp Perumahan Dewa Ruci Sangatta	505.900.000
Jumlah			3.279.400.000

Peralatan dan Mesin

Rp 2.928.389.419

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.928.389.419 dan Rp2.908.539.419

Terdapat mutasi tambah berupa Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 30 Juni 2023.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	9.900.000
Mutasi Tambah :	9,075,000
- Pembelian	9,075,000
- Hibah Masuk	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2023	2,928,389,419
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(2.262.282.055)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	2.928.389.419

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp4.873.641.500

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.873.641.500 dan Rp4.873.641.500

Tidak terdapat mutasi tambah berupa belanja modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 30 Juni 2022.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	4.873.641.500
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2023	4.873.641.500
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(666,700,503)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	4.873.641.500

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp27.517.047

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp27.517.047 dan Rp. 27.517.047

Tidak Terdapat mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 30 Juni 2023.

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	0
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2023	27.517.047
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2022	
Nilai Buku per 30 Juni 2023	27.517.047

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp2.939.463.808

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.939.463.808 dan Rp2.936.982.558

Aset Tak Berwujud
Rp4.900.000

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.900.000 dan Rp4.900.000. Aset tak berwujud ini merupakan Antivirus Kaspersky dengan lisensi selama 2 (dua) tahun.

Aset Lain-lain
Rp49.531.000

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49.531.000 dan Rp49.531.000. Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp54.431.000

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.431.000 dan Rp54.431.000.

Uang Muka dari
KPPN Rp40.000.000

C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp.0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp218.310.949

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp218.310.949 dan Rp8,877,118 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Hibah yang belum
disahkan Rp0

C.13. Hibah yang belum disahkan

Pada pelaporan Tahun 2023 Satker Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak ada saldo hibah yang belum disahkan.

Ekuitas
Rp7.795.556.399

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp7.795.556.399** dan Rp8.143.338.290. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp3.844.400

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp3.844.400** dan Rp3.844.400. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2023 dan 2022*

Uraian	30 Jun 2023	30 Jun 2022
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	3.844.400	3.844.400
Jumlah	3.844.400	3.844.400

Beban Pegawai
Rp1.791.165.082

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.791.165.082** dan Rp1.764.614.222. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

*Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2023	REALISASI 30 JUN 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	552.522.180	484.419.280	6.32
Belanja Pembulatan	11.469	8.922	12.12
Belanja Tunj. Suami / Istri	29.773.530	32.024,030	(2,81)
Belanja Tunj. Anak	8.835.202	8.857.784	(0.1)
Belanja Tunj. Struktural	9.710.000	12.600.000	(8.09)
Belanja Tunj. Fungsional	731.470.000	614.250.000	14.08
Belanja Tunj. Pph PNS	90.258.013	69.620.337	(10,52)
Belanja Tunj. Beras	28.243.800	27.012.660	2,1
Belanja Uang Makan	81.137.000	87.308.000	(2.61)
Belanja Tunj. Umum	8.800.000	6.040.000	10.67
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	64.800.000	64,800,000	0
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1.605.561.194	1,406,941,013	0,17
Pengembalian Belanja Pegawai	0		0
Jumlah Belanja Pegawai	1.605.561.194	1,406,941,013	7,73

Beban Persediaan
Rp12.308.000

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.308.000 dan Rp 23.718.500 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang
dan Jasa Rp
319.051.850

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp319,051,850 dan Rp 347,763,643 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan Rp
200.941.123

D.5. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.200.941.123 dan Rp286.969.154. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan
Dinas Rp35,806,138

D.6. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35,806,138 dan Rp.26.888.580. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 30 Juni 2022 dan 2023

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Perjalanan Dinas	35,806,138	26,888,580
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	35,806,138	26,888,580

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.
0

D.7. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp116,663,252. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2022 dan 2023*

Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	297
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366.329	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	297

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp8.143.338.290

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.143.338.290 dan Rp7.998.431.496

Defisit LO
(2,511,493,803)

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2,511,493,803) dan Rp2.562.772.654 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada

30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-
lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas Rp
2.163.711.912

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.163.711.912 dan Rp2,086,441,688.

Ekuitas Akhir
Rp7,795,556,39
9

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,795,556,399 dan Rp7,522,100,530

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2. INFORMASI AKRUAL

Informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2023 terdapat utang kepada pihak ketiga sebesar Rp218.310.949

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta 653256629861000 a.n.

BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp25.735.300**

F.4. REVISI DIPA

Hingga tanggal 30 Juni 2023, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

1. Revisi 1 pada tanggal 14 Februari 2023.
2. Revisi 2 pada tanggal 12 April 2023

F.5. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2023, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak pernah melakukan ralat SP2D.

F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Muhamad Rodansa, S.I.P.
Bendahara Pengeluaran	:	Yunita Padma

Dewi, A.Md., A.B.

Bendahara Penerima

: Aisyah, S.H., M.H.

2. Pada Periode Semester I tahun 2023 ini, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan koreksi pencatatan barang persediaan sebanyak 1 kali. Data dukung terlampir.

G. LAMPIRAN – LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 27/07/23 12:47 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	40,000,000	0	40,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	549,200	0	549,200	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	549,200	0	549,200	0.00
Persediaan	0	100,000	(100,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	40,549,200	100,000	40,449,200	40,449.20
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,928,389,419	2,908,539,419	19,850,000	0.68
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,095,529,818)	(2,936,982,558)	(158,547,260)	5.40
JUMLAH ASET TETAP	8,013,418,148	8,152,115,408	(138,697,260)	(1.70)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,900,000	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	8,053,967,348	8,152,215,408	(98,248,060)	(1.21)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	218,310,949	8,877,118	209,433,831	2,359.25
Utang Yang Belum Ditagihkan	100,000	0	100,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	40,000,000	0	40,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	258,410,949	8,877,118	249,533,831	2,810.98
JUMLAH KEWAJIBAN	258,410,949	8,877,118	249,533,831	2,810.98
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,795,556,399	8,143,338,290	(347,781,891)	(4.27)
JUMLAH EKUITAS	7,795,556,399	8,143,338,290	(347,781,891)	(4.27)
JUMLAH EKUITAS	7,795,556,399	8,143,338,290	(347,781,891)	(4.27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,053,967,348	8,152,215,408	(98,248,060)	(1.21)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 27/07/23 12:47 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

Tgl Data : 27/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 27/07/23 12:47 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,219,245,000	2,149,638,362	2,069,606,638	51	4,358,956,000	2,089,737,185	2,269,218,815	58
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 27/07/23 12:47 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	8,143,338,290	7,998,431,496	144,906,794	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,511,493,803)	(2,562,772,654)	51,278,851	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,163,711,912	2,086,441,688	77,270,224	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(347,781,891)	(476,330,966)	128,549,075	-
EKUITAS AKHIR	7,795,556,399	7,522,100,530	273,455,869	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran


ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 27/07/23 12:47 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,844,400	3,844,400	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,844,400	3,844,400	0	0
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,844,400	3,844,400	0	0
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,791,165,082	1,764,614,222	26,550,860	1.505
Beban Persediaan	12,308,000	23,718,500	(11,410,500)	(48.108)
Beban Barang dan Jasa	319,051,850	347,763,643	(28,711,793)	(8.256)
Beban Pemeliharaan	200,941,123	286,969,154	(86,028,031)	(29.978)
Beban Perjalanan Dinas	35,806,138	26,888,580	8,917,558	33.165
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/07/23 12:47 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	156,066,010	116,663,252	39,402,758	33.775
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,515,338,203	2,566,617,351	(51,279,148)	(1.998)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,511,493,803)	(2,562,772,951)	51,279,148	(2.001)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	297	(297)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	297	(297)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	297	(297)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,511,493,803)	(2,562,772,654)	51,278,851	(2.001)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,511,493,803)	(2,562,772,654)	51,278,851	(2.001)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kab. Kutai Timur, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

187409182006042001